



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 109 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR  
188.45/005/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/69-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 800.1.3.3/70-KEP.MPKA/BKPSDM tentang Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, Surat Usulan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-138/INSP-SEKRT/700/02/2023 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong, serta Surat Usulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Nomor B-0419/DLH-SET/901/03/2023 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengurus/Pemegang Barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk kembali pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/085/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/005/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 8 pada kolom 4 dan kolom 5, Nomor Urut 19 pada kolom 4, Nomor Urut 20, Nomor Urut 21, Nomor Urut 22, Nomor Urut 25, Nomor Urut 27, Nomor Urut 28, Nomor Urut 30 dan Nomor Urut 31 pada kolom 3 diubah sehingga Nomor Urut 8 pada kolom 4 dan kolom 5, Nomor Urut 19 pada kolom 4, Nomor Urut 20, Nomor Urut 21, Nomor Urut 22, Nomor Urut 25, Nomor Urut 27, Nomor Urut 28, Nomor Urut 30 dan Nomor Urut 31 pada kolom 3 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 02 Maret 2023

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.


DAFTAR PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN		KETERANGAN
			PENGELUARAN	PENERIMAAN	
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Drs. TONIE MARWAN, M.Pd NIP.196603171994121006 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	AHMAD REIDHANI, A.Md,AK NIP.198103232010011019 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ANDRI FATMAWATI, S.AP NIP.198404252010012024 Staf Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Dinas Kesehatan	dr. H. TAUFIQURRAHMAN HAMDIE, M.Kes NIP.197007202002121004 Kepala Dinas Kesehatan	HEFZI RAHMAN, A.MK NIP.198803252011011011 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	LISNA SARI, A.Md NIP.198102212014082003 Staf Fungsional Dinas Kesehatan	
3	RSUD H.Badaruddin Kasim	dr. H. MASTUR KURNIAWAN, MM NIP.197201092006041019 Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	EKA SAMIANA ELPA, A.Md NIP.198501112011012012 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	HASAIRIN NOR, A.Md NIP.198009202011011006 Staf Fungsional RSUD H. Badaruddin Kasim	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. WIBAWA AGUNG SUBRATA, ST, MT NIP.196807141997031004 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	H. HARIIS FADILLAH NIP.196910101993031011 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAHMANI, ST NIP.197804242011011004 Staf Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ERFIN NIRZA SIREGAR, ST NIP.197109282000031003 Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAMADHANISYAH, A.Ma NIP.198307022003121004 Staf Fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	--	
6	Dinas Perhubungan	TUMBUR PARULIAN MANALLU, S.STP, MT NIP.197808051996121002 Kepala Dinas Perhubungan	NOOR HIDAYATULLAH, A.Md,AK NIP.198105162008011019 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	HUSNI THAMRIN, A.Md,AK NIP.198007132006041013 Staf Fungsional Dinas Perhubungan	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	H. M. NOOR RIFANI, SH, ST, MT NIP.197212201998031008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SUSILAWATI, S.AP NIP.198010192007012004 Staf Fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	--	
8	Dinas Lingkungan Hidup	H. SLAMET RIYADI, ST NIP.196708151996031004 Kepala Dinas Lingkungan Hidup	NOVIANSYAH, A.Md NIP.198311152008011017 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	SELAMET RAMADAN, A.Md,AK NIP.198202102010011029 Staf Fungsional Dinas Lingkungan Hidup	
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ir. ROWI RAWAATIANICE, M.T NIP.196611251994032003 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	MARIA ESTER YELLYTA, A.Md NIP.198506092011012014 Staf Fungsional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	--	

1	2	3	4	5	6
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Drs. H. RUSMADI, MM NIP.19671030 199303 1 007 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	M. AZWAR RIDHA, A.Md NIP.19771213 201101 1 003 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	--	
11	Dinas Sosial	Drs. H. ABU BAKAR SIDIQ NIP.19670720 199103 1 014 Kepala Dinas Sosial	FITRI AISYAH, S.Ak NIP. 19850205 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Sosial	--	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	H. SURYANADIE, S.Sos, M.Si NIP.19641215 198602 1 006 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	HAZATUL LAILA, S.AP NIP. 19790116 200701 2 024 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BASIH PRIHATIN, SE NIP. 19850223 201408 2 001 Staf Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	ABDUL HALIM, S.STP NIP.19820420 200112 1 001 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	WERIANSYAH, S.AP NIP. 19810720 200501 1 007 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	FARIDA RINAWATI, S.AP NIP. 19770823 201001 2 003 Staf Fungsional Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si NIP.19780910 199711 1 001 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hj. ERNY ERAWATY KASMA NIP. 19740904 200701 2 009 Staf Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Drs. H. TAZERİYANOR, MA NIP.19671104 198903 1 011 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	DEDY RAHMADI NIP.19821207 200501 1 005 Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	--	
16	Sekretariat Daerah	Hj. HAMIDA MUNAWARAH, ST., MT NIP.19670518 199803 2 004 Sekretaris Daerah	MAHFUD NASRUDIN, A.Md.Ak NIP.19850622 201001 1 021 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	M. MANSYUR, A.Md.Ak NIP.19830610 200701 1 003 Staf Fungsional Sekretariat Daerah	
17	Sekretariat DPRD	Drs. ARBUANSYAH, M.A NIP.19730207 199311 1 003 Sekretaris DPRD	IHRAMSYAH, A.Md NIP. 197904112 200904 1 002 Staf Fungsional Sekretariat DPRD	--	
18	Badan Pendapatn Daerah	Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si NIP. 19720306 199203 1 004 Kepala Badan Pendapatn Daerah	EDI RAHMAN, SE NIP. 19840911 201001 1 015 Staf Fungsional Badan Pendapatn Daerah	ARIYANTI NIP. 19810323 200701 2 004 Staf Fungsional Badan Pendapatn Daerah	
19	Inspektorat Daerah	Drs. M ZAINAL ARIFIN, M.Ec.Dev NIP.19730202 199301 1 001 Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	SUMIATI NIP. 19801130 200712 2 006 Staf Fungsional pada Inspektorat Daerah	--	
20	Kecamatan Tanjung	Drs. ROFIK AZIDDIN, ME NIP.19731212 199903 1 009 Camat Tanjung	KARTIKA ALFAUZAWATI, A.Md.Ak NIP. 19980421 202012 2 004 Staf Fungsional Kecamatan Tanjung	--	

1	2	3	4	5	6
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	H. RUSMADI, S.AP NIP.19650129 198602 1 006 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	IIS KHORINA, A.Md NIP.19871227 201101 2 014 Staf Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	--	
34	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ir. H. MOHAMMAD MUGENI, MM NIP.19630328 199403 1 004 Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	MUHAMMAD RUSDI, A.Md, Ak NIP.19820111 200701 1 006 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	AKHMAD JAWADI NIP.19740518 200701 1 016 Staf Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
35	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dr. H. ERWAN, SH, M.AP NIP.19660921 198703 1 009 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	AIS RAHMAD, A.Md, Ak NIP.19830625 200801 1 012 Staf Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	--	
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hj. NORHAYATI, SE., M.Si NIP.19690203 199803 2 005 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PITRI HERIAWATI NIP.19830413 201212 2 002 Staf Fungsional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	--	
37	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Ir. NORZAIN AKHMAD YANI, M.Si NIP.19651219 199603 1 001 Pit. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	NONY AGUSTINA, A.Md NIP.19820802 200904 2 003 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	LITA ERNAWATI, S.AP NIP.19840929 201212 2 001 Staf Fungsional Dinas Perkebunan dan Peternakan	
38	Dinas Tenaga Kerja	HERWANDI, S.Pd, M.AP NIP.19640925 198804 1 002 Kepala Dinas Tenaga Kerja	DESSY HERAWATI, SE NIP.19831225 201101 2 013 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	RAMADANI, S.AP NIP.19960206 202203 1 001 Staf Fungsional Dinas Tenaga Kerja	
39	Dinas Komunikasi dan Informatika	ARIANTO, S.IP, M.Si NIP.19680515 199003 1 008 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	AYANG SAFITRI, S.Kom NIP.19791026 200904 2 001 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	ERWAN HAMSANI, S.Kom NIP.19780718 200901 1 006 Staf Fungsional Dinas Komunikasi dan Informatika	
40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	H. SYAMANI, SP, MP NIP.19750504 200003 1 012 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	IRLIANSYAH, A.Md, Ak NIP.19800313 200701 1 007 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Hj. HADARIAH, S.AP NIP.19780525 201001 2 010 Staf Fungsional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	
41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ZAHIRSYAH MANUAR, BA NIP.19650601 198609 1 001 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	HERIYADI RUSDIN, A.Md NIP.19780921 201001 1 011 Staf Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah	--	


  
 BUPATI TABALONG.


  
 ANANG SYAKHFIANI

1	2	3	4	5	6
21	Kecamatan Murung Pudak	ABDUL WAHID, SE, Kp NIP. 19770717 199903 1 008 Camat Murung Pudak	NUR HALIDA, A.Md NIP. 19961220 202012 2 019 Staf Fungsional Kecamatan Murung Pudak	--	
22	Kecamatan Tanta	ADY FAZAR, S.Sos, S.H, M.H, Kp NIP. 19781110 200112 1 003 Camat Tanta	TABERANI NIP. 19730309 200906 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Tanta	--	
23	Kecamatan Muara Harus	H. ADITYAPULIA NUGRAHA, S.STP, M.IP NIP. 19861223 200602 1 001 Camat Muara Harus	MAHMUDI HAKKI NIP. 19820215 200701 1 005 Staf Fungsional Kecamatan Muara Harus	--	
24	Kecamatan Barua Lawas	H. FARIDUDDIN, S.AP, MA NIP. 19680105 198903 1 011 Camat Barua Lawas	INTAN PERMATTA SARI, A.Md NIP. 19941207 202012 2 026 Staf Fungsional Kecamatan Barua Lawas	--	
25	Kecamatan Kelua	H. SUWANDI, S.Sos, MAP NIP. 19680705 198903 1 016 Camat Kelua	IKBAR NIP. 19790520 200604 1 015 Staf Fungsional Kecamatan Kelua	--	
26	Kecamatan Pugaan	H. RONY SAPUTRA, S.STP, M.IP NIP. 19850918 200312 1 002 Camat Pugaan	NOVITA SARI, A.Md, Pjk NIP. 19960508 202012 2 021 Staf Fungsional Kecamatan Pugaan	--	
27	Kecamatan Jaro	SAKAM, S.STP NIP. 19820921 200212 1 001 Camat Kelua	SALBANI NIP. 19680206 200701 1 029 Staf Fungsional Kecamatan Jaro	--	
28	Kecamatan Muara Uya	H. SUNARDI, SE, Kp NIP. 19860205 198903 1 011 Camat Muara Uya	HARTONO NIP. 19751028 200501 1 013 Staf Fungsional Kecamatan Muara Uya	--	
29	Kecamatan Haruai	HANDI YANUARDI, S.IP, MA NIP. 19880113 200701 1 001 Camat Haruai	RAHMAN HAKIM NIP. 19871109 200701 1 001 Staf Fungsional Kecamatan Haruai	--	
30	Kecamatan Upau	AGUSTIAN, SE, Kp NIP. 19830809 200501 1 004 Camat Upau	AGI BUDIPRANATA, A.Md NIP. 19970802 202012 1 006 Staf Fungsional Kecamatan Upau	--	
31	Kecamatan Bintang Ara	MUZYADI, S.Sos, Kp NIP. 19690610 200012 1 005 Camat Bintang Ara	FANY TANDIOPANG, A.Md, Pjk NIP. 19970718 202012 2 014 Staf Fungsional Kecamatan Bintang Ara	--	
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME NIP. 19800610 200501 1 014 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	HAIRUL FAHMI, SE NIP. 19850718 200312 1 007 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	KELSEY SWASTARI, A.Md NIP. 19860917 201503 2 005 Staf Fungsional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	